KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Malu dong, beli vitamin kok pakai duit rakyat: DPR anggarkan Rp 2 Miliar
Tanggal : Kamis, 02 September 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-8

DPR Anggarkan Rp 2 Miliar

Malu Dong, Beli Vitamin Kok Pakai Duit Rakyat

Di saat rakyat lagi susah gini, ada-ada saja kelakuan para wakil rakyat kita di Senayan. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin bagi para anggota DPR saja, kocek negara harus keluar hingga Rp 2 miliar. Dengan gaji yang fantastis sebagai anggota DPR, malu dong kalau beli vitamin aja mesti pakai duit rakyat.

SOAL proyek multivitamin ini, bisa diketahui dari informasi yang diunggah dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik DPR RI, *lpse.dpr.go.id*. Situs ini bisa diakses semua orang. Kalimatnya Pengadaan Multivitamin. Pagu paket anggaran senilai Rp 2,1 miliar. "Nilai pagu paket Rp 2.096.080.000. Nilai HPS (harga perkiraan sendiri) Rp

BERSAMBUNG KE HAL 8

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

DPR Juga Anggarkan Layanan Kesehatan Rp 2,5 Miliar

Malu Dong, Beli Vitamin

... DARI HALAMAN 1

2.074.950.955," demikian informasi yang tertulis di situs *lpse.dpr.go.id*.

Sistem pengadaan multivitamin ini adalah tender cepat harga terendah sistem gugur. Tender ini sudah selesai dan dimenangkan PT Chemipharma Julien Djonelida dengan harga terkoreksi Rp 1.733.655.000.

Selain pengadaan multivitamin, ada juga paket pengembangan pelayanan kesehatan (Yankes) DPR RI. Proses penganggaran dan sistem pengadaannya hampir sama dengan paket multivitamin. Tender cepat harga terendah sistem gugur. Pagu anggarannya Rp 400 juta lebih besar dari pengadaan multivitamin. Tender ini juga sudah selesai dan dimenangkan PT Firham Putra Pratama dengan harga terkoreksi Rp 2.468.051.414,40.

Masih ada lagi penganggaran dengan anggaran yang cukup fantastis. Yaitu pengadaan perangkat penunjang kesehatan dengan pagu anggaran Rp 5.492.719.525, yang anggarannya juga bersumber dari APBN 2021. Akan tetapi tender paket ini belum ada pemenangnya. Tahap tender adalah pengumuman pascakualifikasi. Sebanyak 21 peserta dalam lelang perangkat penunjang kesehatan tersebut.

Di luar anggaran kesehatan, terdapat pula anggaran lain yang tidak kalah mencengangkan. Seperti pengadaan jas bagi petugas protokol acara kenegaraan. Pagu anggarannya senilai Rp 1.050.000.000. Lalu Rp 14,2 miliar untuk penggantian kamera CCTV di kompleks rumah dinas di Kalibata dan Ulujami, Jakarta.

Untuk memastikan informasi tersebut, *Rakyat Merdeka* mengkonfirmasi langsung ke pihak Sekretariat Jenderal DPR. Sayangnya, hingga semalam, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar belum merespon.

Apa tanggapan anggota DPR? Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengaku, tidak tahu menahu soal proyek pengadaan multivitamin tersebut. "Belum dapat info," jawabnya singkat.

Anggota DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan malah kagert ditanya soal anggaran multivitamin ini. Daniel bahkan sudah mengkonfirmasi langsung ke Sekjen DPR soal kebenaran proyek pengadaan ini.

"Saya belum tau yah, itu vitamin untuk siapa. Indra (Sekjen DPR) ditelepon malah dirijek," ungkap Daniel.

Sebelum heboh soal multivatimin, DPR juga pernah mendapatkan kritik terkait fasilitas kesehatan. Saat terjadi puncak Corona di bulan Juni-Juli kemarin, ada permintaan dari salah seorang wakil rakyat untuk mendapatkan rumah sakit khusus bagi anggota DPR yang terpapar Corona.

Namun, kemudian usulan itu diluruskan oleh pimpinan DPR. Katanya, usulan itu bersifat personal dan tidak mewakili sikap resmi DPR. Pimpinan fraksi dari anggota itu yang mengusulkan itu juga sudah memberikan klarifikasi.

Setelah fasilitas rumah sakit khusus reda, muncul lagi kebijakan lain yang menuai protes dari masyarakat. Yakni fasilitas hotel bintang 3 di Jakarta, sebagai tempat isolasi bagi wakil rakyat yang menjalani isolasi mandiri. Biaya hotel ini diambil dari anggaran dinas ke luar negeri yang memang tidak terpakai selama pandemi Corona.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengaku geleng-geleng kepala dengan kelakuan para wakil rakyat di Senayan. Di saat rakyat lagi kesusahan imbas dari Corona, harusnya wakil rakyat hadir untuk membantu. Bukan malah membebani negara dengan program yang sama sekali tidak diperlukan.

Lucis lantas teringat dengan Tema HUT DPR ke 76 yang berbunyi 'Hebat Bersama Rakyat'. "Sepertinya multivitamin ini diadakan agar anggota DPR bisa tampil gagah perkasa sehingga tercapailah jargon Hebat Bersama Rakyat," sindir Lucius kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Dia memahami apa yang diinginkan wakil rakyat. Bila imun rendah maka akan mudah terpapar Corona. Begitupun sebaliknya. Namun dengan gaji selangit, tak pantas bagi anggota dewan menggunakan uang rakyat demi kepentingan pribadi.

"Kok kesannya anggota DPR dibikin seperti anak TK yang sampai tetek bengek paling kecil mesti disediakan oleh orangtua. Malu dong," tegasnya.

Dia bilang, DPR acap kali meminta fasilitas yang tidak masuk akal dan tidak mendesak. Artinya, fasilitas-fasilitas itu terkadang tak berkorelasi dengan upaya mendorong kinerja legislator menjadi lebih baik. "Semua fasilitas itu mubazir karena tak berdampak pada penguatan lembaga serta peningkatan kinerja," tegas dia.

Di dunia maya, berbagai protes disampaikan para pegiat media sosial terkait pengadaan vitamin yang anggarannya diambil dari kocek negara. "Hahaha.. bahkan untuk beli vitamin aja mereka gak mampu pakai biaya sendiri, kalah sama rakyat kecil," sindir *@AryaSinulingga*.

"Anggota DPR ini dengan gaji segitu banyak nggak mampu beli vitamin?" tanya *@iambambang*. "Emang gajinya nggak cukup buat beli vitamin ya? Kasihan ya wakil rakyat pasti kurang gizi semua," samber *@NanikR_Cece*.

"Yuk kita gotong royong, patungan buat beli multivitamin para anggota dewan. Kasian, keliatannya ga sanggup beli masing2 dari gajinya," imbuh *@GunSaladin*. "Gaji udah pada gede, multivitamin aja masih minta duit rakyat hadeehhh.." ledek *@sulewinto*.

Akun *@nanovond* mendesak sejumlah pihak bergerak untuk membatalkan penganggaran ini.

"Min ada pembahasan tata cara pembatalan anggaran atau pending anggaran? Prosesnya gimana, pdan jalurnya gimana. Kayaknya kalau anggaran udah diketok awal tahun harus jalan. Kalau udah masuk *time plan* yah susah mau di-*cancel*. Kalau pending sih mungkin bisa yah," harapnya. ■ UMM